

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH “PREMANISME”
(Studi Kasus di Poltabes Surakarta)**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
Dian Savitri
NIM.E0005139**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH “PREMANISME”
(Studi Kasus di Poltabes Surakarta)**

Oleh

Dian Savitri

NIM.E0005139

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Juli 2009

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H.

NIP.19580105 198403 1 001

Sabar Slamet, S.H.,M.H.

NIP.19560727 198601 1 001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH “PREMANISME”
(Studi Kasus di Poltabes Surakarta)**

Oleh

Dian Savitri

NIM.E0005139

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 3 Agustus 2009

DEWAN PENGUJI

1. **Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.** (.....)
NIP.19570203 198503 2 001
Ketua
2. **Sabar Slamet, S.H., M.H.** (.....)
NIP.19560727 198601 1 001
Sekretaris
3. **Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.** (.....)
NIP.19580105 198403 1 001
Anggota

Mengetahui

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.

NIP.19610930 198601 1 001

PERNYATAAN

Nama : Dian Savitri

NIM : E 0005139

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh “Premanisme” (Studi Kasus di Poltabes Surakarta)* adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 15 Juli 2009

yang membuat pernyataan

Dian Savitri

NIM.E0005139

ABSTRAK

Dian Savitri, E0005139. 2009. KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH “PREMANISME” (Studi Kasus di Poltabes Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme dan upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Surakarta.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat diskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari Poltabes Surakarta. Data sekunder bersumber dari dokumen, buku-buku, literatur, majalah, internet, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme diantaranya adalah Pasal 170, 303, 336, 351, 362, 363, 368, 480, 492, 504, 506 KUHP dan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Upaya yang dilakukan oleh pihak Poltabes Surakarta untuk menanggulangi premanisme ditempuh dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Surakarta, sedangkan upaya represif ditempuh dengan dijalkannya “Operasi *Street Crime*” berupa razia-razia serta penindakan terhadap aksi-aksi premanisme. Operasi *Street Crime* di Poltabes Surakarta dimulai pada bulan November 2008 dan masih berlangsung sampai sekarang.

Kata kunci : Tindak pidana, premanisme, penanggulangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala limpahan rizki dan karuniaNya kepada penulis serta tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH “PREMANISME” (Studi Kasus di Poltabes Surakarta)”**.

Penulisan hukum ini membahas mengenai berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme khususnya yang ditangani oleh pihak kepolisian Poltabes Surakarta serta upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Poltabes Surakarta dalam menanggulangi aksi-aksi premanisme yang terjadi di Surakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun imateriil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan, terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Ismunarno, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I skripsi penulis yang telah banyak membantu memberikan pengarahan, bimbingan, serta saran dari awal hingga akhir penulisan hukum ini.
4. Bapak Sabar Slamet, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini hingga selesai.

5. Bapak Isharyanto, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh masa perkuliahan.
6. Kepala Kepolisian Kota Besar Surakarta dan Kepala Satuan Reserse Kriminal yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Dwi Hariyadi selaku KBO Satuan Reserse Kriminal beserta staf yang telah memberikan bimbingan dan informasi selama penulis melaksanakan penelitian di Poltabes Surakarta.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
9. Papi dan Mami tercinta, H. Sumardi Setyo Raharjo, B.A. dan Hj. Wiratmi Sumardi yang selalu membimbing dan tidak henti-hentinya mendoakan penulis serta memberikan segala perhatian baik moral maupun material.
10. Kakak-kakak tersayang, Mbak Nik, Mas Sar, Mbak Atik, Mas Idut, Mbak Rien dan Mas Widhi yang telah memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Keponakan-keponakan terluca, Suci, Sigit, Dita dan Tyo yang selalu menjadi penghibur penulis dengan kelucuan dan keceriaannya.
12. Partner terindah Andre Dicky Prayudha tempatku berbagi tangis dan tawa beserta keluarga terima kasih atas seluruh doa, dukungan, perhatian serta kasih sayang selama ini, semoga Allah SWT selalu memberikan ridho-Nya kepada kita.
13. Retno Kusumastuti atas eksistensinya untuk memberikan dorongan dan motivasinya yang tak lekang oleh batas ruang dan waktu.
14. Novis Purwaningrum, Ermellia Octaviani, Fitriana Yunita Puri, M.Faiq, Bayu Novyandri, Dewi Hartika, atas kehangatan dan keceriaannya yang selalu menemani selama ini.
15. Teman-teman di Fakultas Hukum UNS, Dira, Dije, Dipus, Dipi, Ana, Bintang, Iwan, Aid, Puput, Menul, Kuclux, Reza, Dyah, Endah, Rima, Isti, Kiki, Indri, Thukul, Paito, Rasyid, Prima, Indra, Edy, Maya, Tantri, Putu, Trex, Okky,

Siwenk, Anggun, Brama, Aini, Desita, Intan, Fenty, Septin dan semua angkatan 2005 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidup dan selalu menjadi kenangan.

16. D_G Girls, Richa, Leny, Ratna, Anin, Ucie, Elysa terima kasih atas kebersamaannya selama ini

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara moril maupun materiil.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Surakarta, Juli 2009

Penulis

Dian Savitri

NIM.E0005139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
a. Pengertian Tindak Pidana	15
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
c. Jenis-jenis Tindak Pidana	20
2. Tinjauan Umum Tentang Premanisme	24
a. Pengertian Premanisme	24
b. Macam Premanisme	26
3. Tinjauan Tentang Penyebab Kejahatan	28
a. Teori Kejahatan dari Perspektif Biologis dan Psikologis ..	28

b. Teori Kejahatan dari Perspektif Sosiologis	32
c. Teori Kejahatan dari Perspektif Lainnya	36
B. Kerangka Pemikiran	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme	42
B. Upaya Penanggulangan Premanisme yang Dilakukan oleh Poltabes Surakarta	67
1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif	67
2. Upaya Penanggulangan Secara Represif	70
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel Data Hasil Operasi <i>Street Crime</i>	66
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Analisis Data	13
Gambar II	Kerangka Pemikiran	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Ijin Penelitian	80
Lampiran II	Surat Keterangan Penelitian	81

ABSTRACT

Dian Savitri, E0005139. 2009. A JURIDICAL REVIEW ON CRIMINAL ACTION COMMITTED BY THE “CIVILIANISM” (A Case Study in Poltabes Surakarta). Law Faculty of Sebelas Maret University.

This research aims to find out the criminal action committed by civilianism and the attempt of coping with civilianism conducted by the Surakarta Big City Police (Poltabes).

This study belongs to an empirical law research that is descriptive qualitative in nature. The primary data was obtained from Surakarta Poltabes. Secondary data derived from documents, books, literatures, magazines, internet, law and ordinances relevant to the problem studied. Technique of collecting data employed was interview and literary study. The writer employed a qualitative data analysis technique with interactive model.

Based on the result of research and data analysis that has been conducted, it can be concluded that the criminal action committed by civilianism involves the articles 170, 303, 336, 351, 362, 363, 368, 480, 492, 504, and 506 of Penal Code and the violation against the provision of Emergency Act Number 12 of 1951. The Surakarta Poltabes make the attempts of coping with the civilianism in two ways: preventive and repressive. The preventive attempt is done by giving law education to the Surakarta people, while the repressive one is done by undertaking “*Street Crime* operation” constituting the raids as well as taking and action against the civilianism actions. The *Street Crime* operation in Poltabes Surakarta started from November 2008 and still persists up to now.

Keywords: Criminal action, civilianism, tackling.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan.

Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur di berbagai instansi. Jadi sistem dan struktur formal yang telah ada memunculkan sistem dan struktur informal sebagai bentuk dualitasnya. Kondisi tersebut telah ikut menumbuhsuburkan premanisme. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk *material* dan juga ketidak sesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Di sini yang disebut masyarakat (*society*) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (*class*), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi masyarakat. Dalam perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada *dislokasi* sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat. *Dislokasi* ini bisa diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Praktik premanisme tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual.

Praktik premanisme di dunia bisnis sering kali dijumpai dalam proses pengembalian pinjaman. Ini sempat mengakibatkan bisnis *debt collector* menjamur yang umumnya mempekerjakan bekas narapidana "kelas kakap" yang digunakan sebagai jaminan untuk mengintimidasi pihak lain. Di jaman orde baru, praktik intimidasi tidak jarang juga terjadi pada kalangan yang dianggap "menghambat" rencana perluasan bisnis termasuk dalam bisnis *real estate* dan perkantoran. Bukan itu saja, praktik premanisme juga menjangkiti dunia politik yang sarat akan kepentingan-kepentingan tertentu.

Di dunia politik, tidak jarang premanisme dan budaya berdiri di atas hukum malah lebih kasat mata dibanding dunia lain. Praktis

partai-partai politik utama, baik dari jaman orde baru sampai era reformasi sekarang, memiliki elemen barisan muda pendukung yang secara khusus cenderung diarahkan untuk tujuan intimidatif. Di dalam konsepnya memang kelompok barisan muda tersebut adalah bagian integral dari proses pengkaderan partai. Tetapi pada kenyataannya, tidak jarang ditujukan sebagai alat defensif yang intimidatif dan bisa berubah menjadi anarkis. Juga di kalangan elit politik, budaya berdiri di atas hukum sangat transparan.

Di tengah-tengah masyarakat lapisan bawah, tidak jarang pelaku kriminal yang tertangkap basah akan mendapat hukuman "semua gue" dari masyarakat yang sering membawa maut yang memilukan. Juga di tengah masyarakat, kelompok-kelompok tertentu sempat bebas menjadi "hakim sekaligus polisi" yang membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya akan kebebasan tersebut (<http://www.theindonesianinstitute.org/tpmar1203.htm>).

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau *rape* (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum (Adami Chazawi, 2002:15). Sehingga tentu saja praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang

bersifat sebagai hukuman (*punishment*) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal.

Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Preman yang disidangkan misalnya akan diputus pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Tapi pada kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan. Setelah dibina, preman-preman tersebut dilepaskan, tanpa memikirkan apa manfaat mereka ditangkap dan apa efeknya bagi preman-preman tersebut. Setelah dilepaskan, preman-preman itu akan mengulangi kembali perbuatannya, ditangkap lagi, kemudian dibina, dan dilepaskan kembali. Demikianlah siklus pemberantasan preman di Indonesia sekarang ini yang tidak kunjung henti. Apabila preman tersebut kembali beraksi, maka mungkin teori yang dikemukakan oleh Durkheim adalah sangat tepat, yaitu kejahatan itu merupakan hal normal dan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat (<http://kardomantumangger.blogspot.com>). Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi fenomena-fenomena yang meresahkan masyarakat tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum. Harus dicari suatu formula yang tepat dan dapat mengatasi preman.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan

pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku premanisme di sekitar masyarakat serta upaya penanggulangan premanisme yang ditempuh oleh Poltabes Surakarta. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi yang berjudul : **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH “PREMANISME” (Studi Kasus di Poltabes Surakarta)”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Tindak pidana apa sajakah yang dilakukan oleh premanisme?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Poltabes Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan

maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Poltabes Surakarta.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang sangat berarti bagi penulis.
- c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk

mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- b. Untuk sedikit memberi sumbang pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Untuk mendalami teori–teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak–pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2006:6). Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut bidangnya, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986:10). Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara obyektif mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di Kota Surakarta dan upaya penanggulangannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang didukung atau dilengkapi dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan gabungan antara teori dan praktek lapangan. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian diskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya (Soerjono Soekanto, 1986:10). Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Surakarta. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa di Poltabes Surakarta tersedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan aksi premanisme di kota Surakarta.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Poltabes Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.

5. Sumber Data

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, dalam penelitian ini adalah dari Poltabes Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi :

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
 - a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
 - b) Hasil penelitian dari para sarjana;
 - c) Literatur dan hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto, 2001:113).

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Karena dengan adanya data dapat menunjang penulisan sebagai bahan dalam penulisan itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (*interview*). Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis sambil betatap muka secara langsung dengan KBO Satuan Reserse Kriminal Poltabes Surakarta dan dengan staf Satuan Reserse Kriminal Poltabes Surakarta mengenai hal yang penulis teliti.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Maleong, 2002:103). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2002:8).

Model analisis interaktif maksudnya peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Tiga tahap tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian analisis, berbentuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Menurut H.B. Soetopo (1991:12), reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *field not*. Reduksi data berlangsung terus-menerus sepanjang pelaksanaan penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

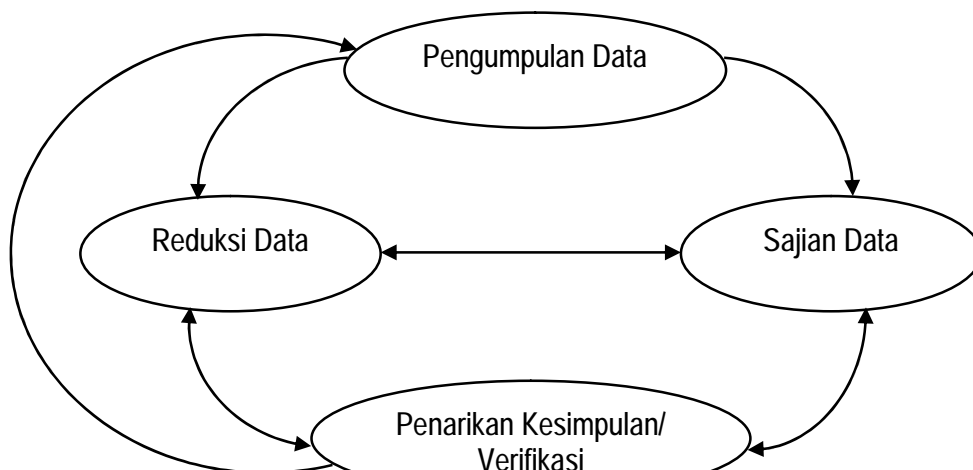
b. Penyajian Data

Suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Selain itu, penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid (Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman dalam Tjejep Rohendi Rohidi,1992:17).

c. Menarik Kesimpulan

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis, atau mungkin dengan seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali (HB. Sutopo, 2002:97).

Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data:



Gambar I. Analisis Data

Maksud model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan data peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi dan sajian data harus disusun pada waktu peneliti sudah memperoleh unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajiannya, maka peneliti dapat kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data (HB. Sutopo, 2002 : 95 – 96).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai penulisan hukum yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai :

A. Kerangka Teori

Kerangka teori akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan judul. Pada bab II memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang premanisme.

B. Kerangka Pemikiran

Berisi alur pemikiran yang hendak ditempuh oleh penulis, yang dituangkan dalam bentuk skema atau bagan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian disertai dengan pembahasan mengenai tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme dan upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Poltabes Surakarta.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi, “tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita” (Adami Chazawi, 2002:67). Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

- 1) Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Martiman P, 1996:16).
- 2) Karni memberi pendapat bahwa ”delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa oleh seorang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan” (Sudarto, 1990:42).

Sedangkan arti *delict* itu sendiri dalam Kamus Hukum diartikan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman (R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005:35).

- 3) Simons, mengemukakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (Simons, 1992:127).

- 4) Menurut P.A.F Lamintang pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan (P.A.F Lamintang, 1997:181).
- 5) Moeljatno berpendapat "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut" (Moeljatno, 2000:54).
- 6) Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I (1990:38) mengemukakan perbedaan tentang istilah perbuatan jahat sebagai berikut:
 - a) perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concrete sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social Verschijnsel, Erecheinung*, fenomena), ialah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat" dalam arti kriminologis.
 - b) perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut.

Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat dibagi menjadi:

- (1) perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

(2) orang yang melanggar larangan itu.

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno, antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil harus ada, karena hanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil juga harus ada, karena perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat, bahwa “kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat” (Sudarto, 1990:43).

Menurut Sudarto tentang unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno,

Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Prof. Moeljatno, maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka; di samping itu pada orang tersebut harus ada

kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab (Sudarto, 1990:44).

Menurut D.Simons, unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*.

- 1) Unsur objektif antara lain:
 - a) Perbuatan orang;
 - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 - c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “di muka umum”.
- 2) Unsur subjektifnya adalah:
 - a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
 - b) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Sudarto, unsur tindak pidana yang dapat disebut sebagai syarat pembedaan antara lain:

- 1) Perbuatannya, syarat:

- a) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).
- 2) Orangnya (kesalahannya), syarat:
- a) Mampu bertanggung jawab;
 - b) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Menurut P.A.F Lamintang, tindak pidana dapat kita bedakan ke dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1) Unsur Objektif

Yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:

- a) Melanggar hukum (*wedenrechtelijkheid*);
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*);

- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya;
- d) Perasaan takut atau *vrees*;
- e) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari berbagi jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Adami Chazawi membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu:

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau *rechterdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat.

Pelanggaran atau *wetdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian.

Tindak pidana sengaja atau *doleus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.

Tindak Pidana kelalaian atau *colpuse delicten* adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

4) Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat.

Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

5) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan *aflopende delicten*. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.

6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan.

7) Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu.

Delicta communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam undang-undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta comunia* tersebut.

Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.

8) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak.

Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

- 9) Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok atau *eenvoudige delicten*, dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan.

Tindak pidana pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya yang biasanya berimbas pada ancaman pidana yang akan dikenakan.

- 10) Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi.

Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita mendasarkan pengaturan

tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di luar kodifikasi.

11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *enkeltvoudige delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja.

Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296 KUHP tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.

2. Tinjauan Umum Tentang Premanisme

a. Pengertian Premanisme

Premanisme berasal dari kata [bahasa Belanda](#) *vrijman* yang diartikan orang bebas, merdeka dan kata *isme* yang berarti aliran. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari [pemerasan](#) kelompok masyarakat lain (<http://id.wikipedia.org>).

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka (1993) memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "preman" dalam dua entri: (1) preman dalam arti partikelir,

bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri; dan (2) preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain). Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan (<http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com>). Istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain (<http://www.blogger.com>).

Istilah preman menurut Ida Bagus Pujaastawa, berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran). Dalam sistem militer ala Barat pengertian *freeman* ini lebih jelas karena ada perbedaan antara militer dan sipil. Misalnya setiap anggota militer yang keluar dari baraknya otomatis menjadi warga sipil dan mengikuti aturan sipil kecuali dia ada tugas dari kesatuannya dan itupun dia harus menggunakan seragam militer. Sayangnya di Indonesia aturan itu tidak berlaku, anggota militer (TNI) walaupun tidak dalam tugas dan tidak memakai seragam militer tidak mau mengikuti aturan sipil (KUHAP). Misalnya anggota militer yang melakukan perbuatan pidana di luar baraknya (markasnya) tidak dibawa ke pengadilan sipil (pengadilan negeri atau pengadilan tinggi) tapi dibawa ke pengadilan militer.

Dalam perkembangan selanjutnya perilaku premanisme cenderung berkonotasi negatif karena, dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal. Namun demikian, keberadaan preman tidak dapat disamakan dengan kelompok pelaku tindak kriminal lainnya seperti pencopet atau penjambret. Preman umumnya diketahui dengan jelas oleh masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasinya, seperti pusat-pusat perdagangan (pasar), terminal, jalan raya, dan pusat hiburan.

b. Macam premanisme

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane (<http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com>), setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu :

- 1) Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas;
- 2) Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan;
- 3) Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan;
- 4) Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi.

Biasanya preman seperti ini, dibayar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Berbeda dengan preman jenis ketiga, karena preman jenis ini biasanya pimpinanlah yang membayar atau menggaji anak buahnya.

Preman jenis keempat ini, masuk kategori preman berdasi yang wilayah kerjanya menengah ke atas, meliputi area politik, birokrasi, dan bisnis gelap dalam skala kelas atas. Dalam operasinya, tidak sedikit di antara mereka di-*backup* aparat.

Kerjanya rapih, dan sulit tersentuh hukum, karena hukum dapat mereka beli, dengan memperlak para aparatnya.

Pendapat lain berasal dari Azwar Hazan mengatakan, ada empat kategori Preman yang hidup dan berkembang di masyarakat:

1) Preman tingkat bawah

Biasanya berpenampilan dekil, bertato dan berambut gondrong. Mereka biasanya melakukan tindakan kriminal ringan misalnya memalak, memeras dan melakukan ancaman kepada korban.

2) Preman tingkat menengah

Berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya mereka menggunakan cara-cara preman bahkan lebih “kejam” dari preman tingkat bawah karena mereka merasa “legal”. Misalnya adalah *Agency Debt Collector* yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang nasabah yang menunggak pembayaran angsuran maupun hutang, dan perusahaan *leasing* yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi.

3) Preman tingkat atas

Adalah kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organisasi massa bahkan berlindung di balik agama tertentu. Mereka “disewa” untuk membela kepentingan yang menyewa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang “dilegalkan”.

4) Preman elit

Adalah oknum aparat yang menjadi *backing* perilaku premanisme, mereka biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adalah aktor intelektual perilaku premanisme (<http://www.kendariekspres.com>).

3. Tinjauan Tentang Penyebab Kejahatan

Semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminalitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan. Apabila kita membicarakan mengenai kejahatan termasuk sebab-sebabnya tentu tidak akan terlepas dari ilmu kriminologi. Menurut Bonger mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya. Menurut sumber yang didapat penulis dari (<http://bengkuluutara.wordpress.com>) menyatakan bahwa dalam teori kriminologi sendiri kejahatan terbagi ke dalam tiga perspektif yaitu perspektif biologis dan psikologis, kemudian perspektif sosiologis dan yang ketiga adalah dari perspektif lainnya.

a. Teori Kejahatan dari Perspektif Biologis dan Psikologis

“Cesare Lombroso” seorang Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*” menjelaskan tentang kejahatan dari mashab klasik menuju mashab positif.

Perbedaan signifikan antara mashab klasik dan mashab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Dimana para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu dan lain-lain.

Sementara dari tokoh biologis mengikuti tradisi Charles Goring dalam upaya menelusuri tentang tingkah laku kriminal.

1) Penjelasan Biologis Atas Kejahatan

Auguste Comte membawa pengaruh penting bagi para tokoh mazhab positif menurutnya ” *there could be no real knowledge of social phenomena unless it was based on a positivist.*” Tokoh yang terkenal diantaranya yaitu:

a) Cesare Lombroso

Cesare Lombroso mengabungkan *positivisme comte* dan evolusi dari Darwin. Ajaran inti dari teori Lombroso menjelaskan tentang penjahat mewakili suatu tipe keanehan fisik, yang berbeda dengan *non criminal*, dia mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

Teorinya tentang *born criminal* menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat.

b) Enrico Ferri

Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh interaksi antara faktor fisik dan faktor sosial. Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol dengan perubahan sosial misalnya kontrol kelahiran (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2002:40).

c) Raffaella Garafola

Menurut teori ini kejahatan-kejahatan alamiah ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak peduli pandangan

pembuat hukum dan tidak ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya.

d) Charles Buchman Goring

Goring menyimpulkan tidak ada perbedaan-perbedaan signifikan antara penjahat dan non penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapat lebih kecil dan ramping. Ia menafsirkan temuan ini sebagai penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara biologi lebih inferior tetapi tidak menemukan satu pun tipe fisik penjahat.

2) Teori-Teori Fisik (*Body Types Theories*)

a) Ernst Kretchmer (1888-1964)

Ernst Kretchmer mengidentifikasi empat tipe fisik yakni;

- (1) *Asthenic*, dengan ciri-ciri kurus, bertubuh ramping dan berbahu kecil;
- (2) *Athletic*, dengan ciri fisik menengah tinggi, kuat, berotot dan bertulang kasar;
- (3) *Pyknic*, dengan ciri fisik tinggi sedang, figur tegap, leher besar dan wajah luas;
- (4) dan beberapa tipe campuran yang tidak terklasifikasi (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2002:40).

b) Ernest A. Hooten

Beliau adalah seorang antropolog fisik. Perhatiannya terhadap kriminalitas yang secara biologis ditentukan dengan publikasinya yang membandingkan penghuni penjara di Amerika dengan suatu *control group* dari non kriminal.

c) William H. Sheldon

Ia memformulasikan sendiri sendiri kelompok *somatotypes*. Menurutny orang yang didominasi sifat bawaan

mesomorph (secara fisik kuat, agresif dan atletis) cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat perilaku ilegal.

d) Sheldon Glueck

Sheldon Glueck melakukan studi komparatif antara pria delinquent dengan non-delinquent.

3) Penjelasan Psikologis Atas Kejahatan

a) Teori Psikoanalisis (Sigmund Freud)

Teori ini menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu *conscience* yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan si individu dan bagi kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

b) *Moral Development Theory*

Lawrence Kohlberg seorang psikolog menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap yakni; *preconventional stage*, *conventional level*, dan *postconventional*.

Sedangkan John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi sejak lahir dan konsekuensi bila tidak mendapatkan itu, dia mengajukan *theory of attachment*.

c) *Social Learning Theory*

Teori pembelajaran ini berpendirian bahwa perilaku delinquent ini dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagai mana semua perilaku non delinquent. Tokoh yang mendukung teori ini diantaranya adalah :

(1) Albert Bandura

Ia berpendapat bahwa individu-individu yang mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling. Misalnya anak belajar bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain.

(2) Gerard Peterson

Ia menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung. Ia melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya, tetapi kadang-kadang mereka berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri dan akhirnya mereka mulai berkelahian.

(3) Ernest Burgess dan Ronald Akers

Dimana mereka menggabungkan *learning theory* dari Bandura yang berdasarkan psikologi dengan *theory differential association* dari Erwin Sutherland yang berdasarkan sosiologi dan kemudian menghasilkan teori *differential association reinforcement*.

b. Teori Kejahatan dari Perspektif Sosiologis.

Dimana teori-teori sosiologis mencari alasan perbedaan dalam angka kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikategorikan dalam 3 kategori umum yakni; *strain*, *culture deviance*, dan *social control*.

1) *Strain Theories*

Salah satu teori dari kategori *strain theories* adalah *Theory Anomie* dari Emile Durkheim. Ia menyakini jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma akan merosot dimana kelompok-kelompok akan terpisah dan

dalam ketiadaan dalam satu set aturan-aturan umum tindakan dan harapan orang dalam satu sektor mungkin akan bertentangan tindakan dan harapannya orang lain dengan tidak dapat diprediksi perilaku sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu dalam kondisi anomie.

Durkheim mempercayai bahwa hasrat manusia adalah tak terbatas satu. Karena alam tidak mengatur batas-batas biologis yang ketat untuk kemampuan manusia.

2) Teori-Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*)

Tiga teori utama dari *cultural deviance theories* yakni:

a) *Social Disorganization*

Teori ini terfokus pada perkembangan disintegrasi nilai konvensional yang disebabkan industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi. Tokoh yang terkenal diantaranya adalah:

(1) W.I Thomas dan Florian Znanieck

Dalam buku mereka yang berjudul *The polish peasant in Ueropa and America* menggambarkan pengalaman sulit yang dialami petani Polandia ketika mereka meninggalkan dunia lamanya yaitu pedesaan untuk menuju kota industri di dunia baru. Selain itu mereka menyelidiki asimilasi dari para imigran dimana para imigran tua tidak begitu terpengaruh akan kepindahan itu meski berada di daerah kumuh. Tidak demikian dengan generasi muda mereka memiliki sedikit tradisi lama tetapi tidak terasimilasi dengan tradisi dunia baru.

(2) Robert Park dan Ernest Burgess.

Mereka mengembangkan lebih lanjut studi tentang *social disorganization* dari Thomas dan Znaniecki dengan mengintrodusir analisa ekologis dari masyarakat dunia.

Dalam studinya tentang *disorganization sosial* mereka meneliti karakter daerah dan bukan meneliti para penjahat untuk penjelasan tentang tingginya angka kejahatan.mereka mengembangkan pemikiran tentang *natural urban areas* yang terdiri atas zona-zona konsentrasi yang memanjang keluar dari distrik pusat bisnis di tengah kota.

(3) Clifford Shaw dan Hendri McKay

Dimana mereka menunjukan bahwa angka tertinggi dari dilenquent berlangsung terus di area yang sama dari kota Chicago meskipun komposisi etnis berubah. Penemuan ini membawa kesimpulan bahwa faktor yang paling menentukan bukanlah etnisitas melainkan posisi kelompok didalam penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya.

b) *Culture Conflict Theory*

Menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norm* yang berbeda dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan konvensional kelas menengah. Tokohnya yang terkenal adalah Thorsten Sellin dimana ia mengatakan *conduct norm* merupakan aturan yang merefleksikan dari sikap-sikap dari kelompok yang masing-masing dari kita memilikinya.

c) *Differential Association Theory*

Memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap anti sosial serta pola tingkah laku kriminal. Tokohnya yang terkenal adalah; Edwind H. Sutherland dimana ia menggantikan konsep *social disorganized* dengan konsepnya tentang *differential social organization*.

3) Kontrol Sosial (*Social Control*)

Konsep kontrol sosial lahir pada peradaban dua puluhan, e.A.ros salah seorang Bapak sosialog Amerika berpendapat bahwa sistem keyakinanlah yang membimbing apa yang dilakukan oleh orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih.

Berikut ini beberapa pendapat yang tergabung dalam teori kontrol sosial:

a) Travis Hirchi (*Social Bonds*)

Ia menyebutkan empat *social bonds* yang mendorong *socialization* dan *conformity* diri yaitu; *attemment* (kasih sayang), *commitment*, *involvement*, dan *bilief*. Menurutny semakin kuat ikatan-ikatan ini semakin kecil kemungkinan terjadi *dilenquency*.

b) Michael Gotfredson Dan Travis Hirschi (*Self Control Theory*)

Mereka justru menegaskan bahwa *self control* yang terpendam pada awal kehidupan seseorang menentukan siapa yang jatuh sebagai pelaku kejahatan. Jadi kontrol merupakan suatu keadaan internal yang permanen dibandingkan pada hasil dari perjalanan faktor biologis. Menurut mereka *self control* merupakan alat pencegah yang membuat seseorang menolak kejahatan dan pemuasan sesaat.

c) David Matza (*Techniques Of Netralization*)

Pada tahun 1960an ia mengembangkan suatu perspektif yang berbeda secara signifikan pada sosial kontrol dengan menjelaskan mengapa sebagian remaja hanyut kedalam atau keluar dari delinquency. Menurutnya remaja merasakan suatu kewajiban moral untuk menaati atau terikat dengan hukum.

Jika seorang remaja terikat oleh aturan sosial bagaimana menjustifikasikan tindakan mereka. Jawabnya bahwa mereka mengembangkan *technique of neutralization* untuk merasionalisasikan tindakan mereka.

d) Albert J. Reiss (*Personal And Social Control*)

Menurutnya delinquency merupakan hasil dari kegagalan dalam menanamkan norma berperilaku yang secara sosial diterima dan ditentukan, runtuhnya kontrol sosial, dan tiadanya aturan aturan yang menentukan tingkah laku dikeluarga sekolah dan kelompok sosial lainnya.

e) Walter C. Reckless

Containment theory menurutnya adalah untuk menjelaskan mengapa ditengah berbagai dorongan dan tarikan tarikan kriminogenik yang beraneka macam apapun itu bentuknya, *conformity* tetaplah menjadi sikap yang umum.

c. Teori Kejahatan dari Perspektif Lain.

Teori dari perspektif lainnya ini merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan teori sebelumnya. Penjelasan alternatif ini secara tegas menolak model konsensus tentang kejahatan dimana semua teori sebelumnya. Menurut teori ini kalau perbuatan tidak dibuat kejahatan oleh hukum maka tidak seorang pun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai seorang penjahat. Teori-teorinya antara lain:

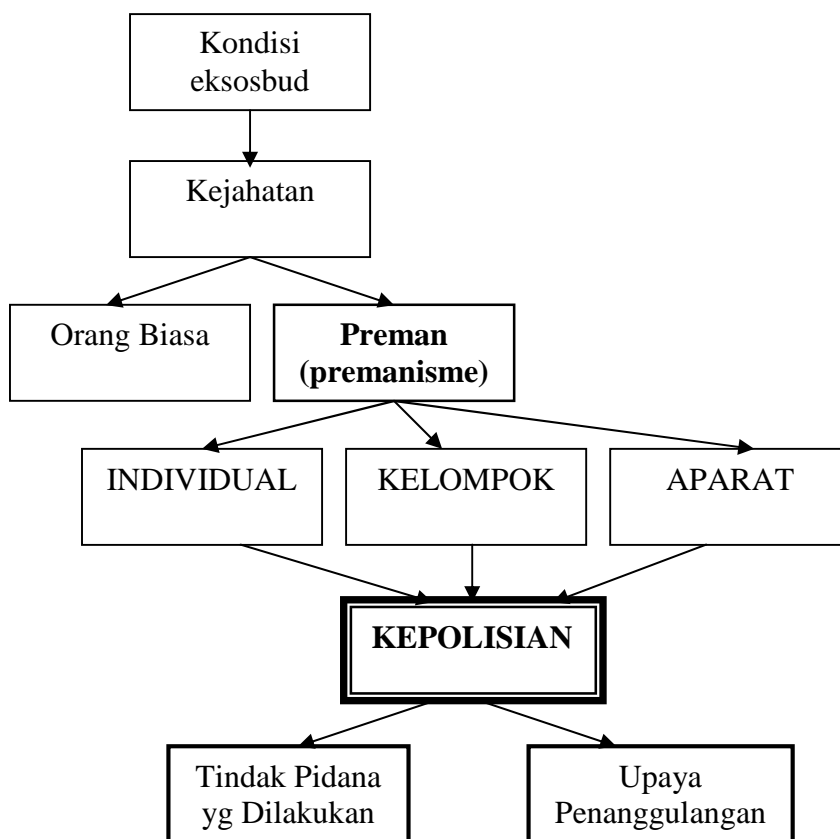
1) *Labeling Theory*

Para pakar memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.

2) *Conflict Theory*

Teor konflik ini menyualkan mengenai proses pembuatan hukum itu sendiri.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar II. Kerangka Pemikiran

KETERANGAN:

Perekonomian negara yang sempat memburuk membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat, termasuk kondisi social dan

kebudayaan. Dengan kondisi seperti ini menempatkan masyarakat pada keadaan yang rentan akan tingginya tingkat kejahatan yang disebabkan oleh desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik oleh orang biasa maupun oleh para oknum yang sengaja “berprofesi” sebagai preman. Preman terbiasa dengan aliran hidup bebas, sehingga cenderung menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuannya termasuk dengan tindak kejahatan “premanisme”. Premanisme dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh individu-individu saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh kelompok tertentu dan bahkan oleh aparat sekalipun. Pihak kepolisian yang notabene sebagai pengayom masyarakat diharapkan mampu menangkap fenomena-fenomena seperti ini untuk kemudian dikaji lebih lanjut sehingga dapat dicari cara atau upaya penganggulangnya serta dapat ditangani lebih secara tepat demi menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka memperjelas dan memperkuat serta mendukung uraian dari bab-bab yang telah diuraikan dimuka, maka dalam bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap hasil wawancara yang diperoleh penulis serta Data Hasil Operasi *Street Crime* di Poltabes Surakarta.

Berikut adalah petikan wawancara penulis dengan KBO Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Besar Surakarta mengenai tindak pidana premanisme dan upaya penanggulangannya oleh Poltabes Surakarta.

Tanya : Operasi pemberantasan premanisme terdengar kembali setelah ada seruan dari Kapolri tentang “perang terhadap premanisme”. Adakah definisi secara resmi dari pihak kepolisian tentang “premanisme” itu sendiri?

Jawab : Sebenarnya tidak ada definisi resmi dari pihak kepolisian tentang arti “premanisme”. Namun berdasarkan berbagai sumber yang ada, kata premanisme berasal dari kata “vrijman” yang berarti manusia bebas. Sehingga premanisme adalah paham yang menganut gaya hidup bebas.

Tanya : Berdasarkan pernyataan dari Kapolri yang menyatakan perang terhadap premanisme. Mengapa pihak kepolisian sepertinya sangat *concern* terhadap permasalahan premanisme?

Jawab : Premanisme yang menganut gaya hidup bebas dirasa sangat dekat dengan pelanggaran hukum termasuk tindak kekerasan. Tentu saja perilaku-perilaku tersebut akan membawa dampak negatif terhadap keamanan di masyarakat. Berkaitan dengan tugas pokok kepolisian sebagai pengayom masyarakat, maka pihak kepolisian berkewajiban untuk menjaga kondisi kehidupan masyarakat agar tetap kondusif. Salah satunya dengan menekan angka kriminalitas dalam hal adalah ini aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat.

Tanya : Menindak lanjuti pernyataan dari Kapolri tentang pemberantasan premanisme. Maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Poltabes Surakarta seperti apa?

Jawab : Untuk permasalahan premanisme pihak poltabes surakarta melaksanakan operasi dengan sandi “Operasi Street Crime”.

Tanya : Terkait dengan permasalahan premanisme di Kota Surakarta khususnya yang ditangani oleh Poltabes Surakarta. Bagaimanakah pelaksanaan dari “Operasi Street Crime” tersebut?

Jawab : Pelaksanaan Operasi Street Crime pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan operasi-operasi yang lain yang dilaksanakan oleh Poltabes Surakarta. Operasi tersebut dilaksanakan secara terstruktur di kepolisian dan mengenai waktu serta tata cara pelaksanaannya juga sudah ditentukan. Untuk Operasi Street Crime ini sendiri berlangsung sejak bulan November 2008 dan masih berlangsung sampai sekarang.

Tanya : Berdasarkan hasil pelaksanaan Operasi Street Crime, tindak pidana apa sajakah yang biasanya dilakukan oleh preman?

Jawab : Tindak pidana oleh premanisme yang terjaring oleh Operasi Street Crime biasanya berupa tindak pidana ringan, kemudian tindak pidana seperti pada Pasal 170 KUHP, Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP, Pasal 504 KUHP dan selengkapnya dapat dilihat pada data hasil Operasi Street Crime.

Tanya : Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme tersebut, bagaimanakah upaya penanggulangannya oleh pihak Poltabes Surakarta?

Jawab : Untuk upaya penanggulangan terhadap premanisme pihak Poltabes Surakarta menempuh dengan cara preventif dan represif.

Tanya : Bagaimana pelaksanaan konkritnya?

Jawab : Cara preventif ditempuh dengan melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberian penyuluhan hukum ini tidak hanya

dilakukan oleh Poltabes Surakarta, tetapi juga atas kerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta dan instansi yang terkait. Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjadi masyarakat yang sadar hukum, hal ini terkait dengan peran masyarakat dalam upaya mengungkap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Mengenai cara represif adalah dengan penindakan berupa melaksanakan Operasi Street Crime terhadap aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan Operasi Street Crime salah satunya adalah dengan melaksanakan razia secara terstruktur di tempat-tempat umum yang biasanya di tempat tersebut sering terjadi aksi-aksi premanisme.

Tanya : Bagaimanakah tindak lanjut terhadap pelaksanaan Operasi Street Crime?

Jawab : Untuk kasus-kasus yang perlu diproses lebih lanjut, tentunya pihak Poltabes akan memproses pelakunya sesuai prosedur, sedangkan untuk kasus-kasus yang dirasa cukup ditindak lanjuti dengan dibina ya akan dibina dengan prosedur yang ada pula.

Tanya : Untuk kasus-kasus yang diproses, kemudian bagaimanakah tindak lanjutnya?

Jawab : Untuk kasus-kasus yang diproses, pada walnya phak Poltabes akan melakukan penahanan terlebih dahulu untuk kemudian dapat diproses ke tahap selanjutnya. Apabila telah selesai di proses di kepolisian tentu saja proses akan berlanjut ke kejaksaan dan kemudian ke pengadilan. Namun demikian pelaksanaan dari upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Poltabes Surakarta adalah sampai pada tahap pemrosesan di kepolisian saja, setelah itu adalah merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim di pengadilan.

Tanya : Adakah saran mengenai upaya penanggulangan premanisme ini?

Jawab : Saran terutama untuk masyarakat, masyarakat dihimbau lebih kooperatif membantu pihak kepolisian dalam upaya mengungkap kejahatan yang

terjadi di masyarakat, salah satunya adalah aksi-aksi premanisme. Informasi dan laporan dari masyarakat merupakan sumber yang penting bagi pihak kepolisian dalam rangka melaksanakan upaya penanggulangan terhadap premanisme. Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib apabila mendapati atau mengalami tindak kejahatan oleh preman. Apabila kerja sama dengan masyarakat ini dapat terjalin dengan baik, maka hasil yang didapat dari upaya penanggulangan premanisme ini akan lebih maksimal.

A. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme

Berdasarkan data hasil "Operasi *Street Crime*" di Poltabes Surakarta pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 terdapat 11 (sebelas) pasal dari KUHP yang disangkakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme serta 1 (satu) tindak pidana seperti yang dirumuskan pada Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Adapun tindak pidana menurut hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 170 KUHP

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Unsur-unsur dari Pasal 170 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 170 melarang “melakukan kekerasan”. Menurut Pasal 89 KUHP melakukan kekerasan diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari pengrusakan dan penganiayaan tetapi dapat pula kurang dari itu. Misalnya bila seseorang melemparkan batu kepada orang lain.
- b. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan (Pasal 489), penganiayaan (Pasal 351), dan pengrusakan barang (Pasal 406). Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya berupa melemparkan batu ke arah seseorang, maka tidak perlu ada orang atau barang yang terkena lemparan batu tersebut.
- c. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini.
- d. Kekerasan itu harus ditujukan kepada “orang atau barang”. Hewan atau barang masuk pula pada pengertian barang ini. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, tetapi jika sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin juga bisa terjadi.
- e. Kekerasan itu harus dilakukan secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak dipedulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya “dimuka umum”, karena kejahatan ini

memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum berarti ditempat publik dapat melihatnya.

f. Hukuman dalam pasal ini adalah maksimum penjara lima tahun enam bulan. Hukuman itu dinaikkan:

- 1) menjadi tujuh tahun apabila para pelaku sengaja menghancurkan barang atau apabila kekerasan yang dilakukan, mengakibatkan orang mendapat luka-luka (ayat 2 ke-1);
- 2) menjadi sembilan tahun apabila berakibat luka berat (ayat 2 ke-2);
- 3) menjadi dua belas tahun apabila berakibat matinya seseorang (ayat 2 ke-2).

Apabila akibat-akibat dari 1, 2, 3 ini hanya disebabkan oleh perbuatan salah seorang dari para pelaku, maka untuk pelaku-pelaku yang lain tambahan hukuman tidak berlaku.

2. Pasal 303 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pemain.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Permainan judi di sini adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di dalamnya termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Unsur-unsur dalam Pasal 303 KUHP:

- a. Obyek dalam pasal ini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Bukan semua permainan masuk *hazardspel*. *Hazardspel* diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Masuk *hazardspel* juga adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain, misalnya permainan dadu, *roulette* dan lain-lain. Juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, dan pertandingan sepak bola.
- b. Dihukum menurut pasal ini adalah:
 - 1) Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat-tempat yang tertutup atau di kalangan yang tertutup itu sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;
 - 2) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah mendapatkan izin dari yang berwajib, tidak dihukum;
 - 3) Turut main judi sebagai pencaharian.
- c. Sedangkan orang yang mengadakan main judi dihukum menurut pasal ini, maka orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis.
- d. Dengan ketentuan ayat (2), jika yang bersalah melakukan kejahatan ini dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari (*beroep*), maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

3. Pasal 336 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
- (2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsurnya adalah:

- a. Dihukum menurut pasal ini adalah mengancam dengan:
 - 1) kekerasan dimuka umum dengan memakai kekuatan bersama kepada orang atau barang (Pasal 170);
 - 2) suatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dari orang atau barang (Pasal 187 dan Pasal 106);
 - 3) memaksa atau perbuatan melanggar kesopanan (*verkrachting*) Pasal 285 dan Pasal 289;
 - 4) suatu kejahatan terhadap jiwa orang (Pasal 338);
 - 5) penganiayaan berat (Pasal 354) dan pembakaran (Pasal 187).
- b. Diancam hukuman lebih berat, jika ancaman itu dilakukan dengan surat (tertulis) atau dengan perjanjian tertentu.
- c. Kejahatan mengancam ini baru dipandang selesai, apabila ancaman itu telah sampai diketahui oleh yang diancam, sebelumnya itu dipandang sebagai percobaan. Tidak perlu, bahwa apa yang diancamkan itu betul-betul dilaksanakan.
- d. Hukuman yang diancamkan pada tindak pidana ini adalah maksimum hukuman penjara dua tahun delapan bulan, dan menurut ayat (2) dinaikkan menjadi lima tahun apabila ancaman dilakukan dengan suatu syarat tertentu.

Tindak pidana ini termuat dalam titel XVII Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang. Sebenarnya yang kini terganggu bukanlah kemerdekaan orang untuk bergerak, melainkan ketentraman orang karena dengan ancaman ini orang yang diancam akan takut akan terjadinya berbagai tindak pidana tersebut. Jadi, kemerdekaan bergerak dari orang hanya mungkin akan terganggu. Maka, orang yang diancam itu tidak perlu mengetahui adanya ancaman tersebut. Jadi, kalau ancaman tersebut diucapkan di luar kehadiran orang yang diancam, maka tindak pidana pengancaman ini baru selesai apabila ancaman itu telah disampaikan kepadanya.

4. Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur dalam Pasal 351 di atas antara lain:

- a. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Penganiayaan dapat diartikan berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah:

- 1) sengaja merusak kesehatan orang;
- 2) perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke sungai hingga basah kemudian orang tersebut dipaksa berdiri di bawah terik matahari;
- 3) rasa sakit, misalnya menyubit, memukul;

- 4) luka, misalnya mengiris atau memotong;
- 5) merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur berkeringat, kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga menyebabkan orang tersebut masuk angin.

Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.

- b. Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa. Diancam hukuman lebih berat, apabila berakibat luka berat atau mati. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat itu dimaksud, dikenakan Pasal 354 (penganiayaan berat) sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338). Lain lagi halnya dengan seorang sopir yang mengendarai mobilnya kurang hati-hati, menabrak seseorang hingga mati. Perbuatan itu bukanlah suatu penganiayaan, berakibat matinya orang (Pasal 351 ke-3) oleh karena sopir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya. Ini juga tidak masuk pembunuhan (Pasal 338), karena kematian orang itu tidak dikehendaki sopir. Peristiwa itu dikenakan Pasal 359 (karena salahnya menyebabkan matinya orang lain).
- c. Percobaan melakukan penganiayaan biasa ini tidak dihukum, demikian pula percobaan melakukan penganiayaan ringan (Pasal 352). Akan tetapi percobaan pada penganiayaan tersebut pada Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355 akan dihukum.
- d. Pada ayat (2) disebutkan tentang luka berat, dan luka berat menurut Pasal 90 KUHP antara lain :
 - 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut (*levens gevaar*);
 - 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
 - 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu panca indera;

- 4) Kekudung-kudungan;
- 5) Kelumpuhan;
- 6) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu;
- 7) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) adanya kesengajaan;
- 2) adanya perbuatan;
- 3) adanya akibat perbuatan (dituju) yakni rasa sakit, tidak enak pada tubuh dan lukanya tubuh;
- 4) akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Unsur 1 dan 4 adalah bersifat subyektif. Sedangkan unsur 2 dan 3 bersifat obyektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.

5. Pasal 362 KUHP

”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dalam Pasal 362 KUHP ini adalah pencurian biasa, elemen-elemennya sebagai berikut:

- a. perbuatan mengambil;
- b. yang diambil harus sesuatu barang;
- c. barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

- 1) Mengambil dalam pasal ini berarti mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian, tetapi penggelapan (Paal 372). Mengambil barang, kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.
- 2) Pencurian (*diefstal*) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Apabila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri.
- 3) Suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (bukan manusia). Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud. Barang ini tidak perlu mempunyai nilai ekonomis. Apabila mengambil sesuatu barang tidak dengan ijin dari pemiliknya, masuk pencurian.
- 4) Sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang yang tersebut. Contoh lain sebagian kepunyaan orang lain misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu milik A dan B, disimpan di rumah A kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian,

misalnya binatang yang hidup di alam bebas dan barang-barang yang sudah di buang oleh pemiliknya.

- 5) Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemukan barang di jalan lalu mengambilnya. Bila waktu mengambilnya sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, maka masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa akan menyerahkan barang itu ke pihak yang berwenang, akan tetapi setelah sampai di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan ke polisi) maka ia salah karena “penggelapan” (Pasal 372) karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya.
- 6) Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.
- 7) Wujud perbuatan memiliki barang. Perbuatan ini dapat berwujud bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

6. Pasal 363 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat, sedangkan yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:

- a. Bila ada barang yang dicuri itu adalah hewan (semua binatang yang memamah biak, binatang berkuku satu dan babi). Pencurian dianggap berat karena hewan merupakan milik seorang petani yang yang terpenting.
- b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam bencana alam.
 - 1) Pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat musibah ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya;
 - 2) Antara terjadinya bencana dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya pencuri harus betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk disini misalnya seorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu dibagian kota ada kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu;

- 3) Alasan untuk memberatkan hukuman atas pencurian ini adalah bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan rasa kekhawatiran pada khalayak ramai yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian, sedangkan seharusnya orang-orang sebaliknya memberikan pertolongan kepada para korban.
- c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- 1) Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
 - 2) Rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak masuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubuk atau kereta, perahu yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk dalam pengertian rumah;
 - 3) Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;
 - 4) Disini pencuri harus betul-betul masuk dalam kedalam rumah tersebut dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau ia mengulurkan tangannya saja kedalam rumah untuk mengambil barang, tidak termasuk disini;
 - 5) Unsur "waktu malam" digabungkan dengan tempat rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, ditambah dengan unsur adanya si pencuri di situ tanpa atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Gabungan unsur-unsur ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat kepada pencurian.

- d. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya membantu saja (Pasal 56).
- 1) Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaam waktu mengambil barang-barang;
 - 2) Dengan digunakannya kata dilakukan (*gepleeged*), bukan kata diadakan (*begaan*), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah turut melakukan (*medeplegen*) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Pasal 363 ayat (1) nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP;
 - 3) Bekerja sama ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.
- e. Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.
- 1) Membongkar, pengertian membongkar adalah merusak barang yang agak besar misalnya pintu atau tembok. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pembongkaran (*braak*)

terjadi apabila misalnya dibuat lubang pada suatu tembok atau dinding suatu rumah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali tidak termasuk pengertian membongkar;

- 2) Memecah yaitu merusak barang yang agak kecil misalnya kaca jendela. Perusakan (*verbreking*) terjadi apabila misalnya hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti dirusak;
- 3) Memanjat menurut Pasal 99 KUHP yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Arti memanjat diperluas hingga meliputi membuat lubang di dalam tanah di bawah tembok dan masuk rumah melalui lubang tersebut, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang dengan demikian dianggap tertutup (*besloten erf*);
- 4) Anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah dan peti. Anak kunci disini artinya diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, misalnya sepotong kawat;
- 5) Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;
- 6) Pakaian jabatan palsu (*valsche costuum*) adalah kostum yang dipakai oleh seseorang, sedang ia tidak berhak untuk itu. Pakaian

itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula pakaian seragam seragam dari sebuah perusahaan pertikelir.

f. Dalam Pasal 363 sub 5 dikatakan:

- 1) Si tersalah masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar dan lain sebagainya. Ini berarti pembongkaran tersebut untuk masuk ke tempat tersebut, dan bukan untuk keluar atau keperluan lain;
- 2) Si tersalah mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan lain sebagainya. Mencapai artinya memasukkan ke dalam kekuasaannya.

g. Dengan disebutkannya hal-hal yang kini memberatkan hukuman, maka apabila orang sedang melakukan pembongkaran atau perusakan atau pemanjatan, dan pada waktu itu diketahui sehingga si pelaku lari, orang itu sudah dapat dipersalahkan melakukan percobaan melakukan pencurian (*poging tot diefstal*) karena perbuatan pembongkaran dan lain-lain tersebut dapat dianggap termasuk tahap menjalankan (*iutvoering*) dari Pasal 53 KUHP tindak pidana pencurian khusus (*gequalificeerde diefstal*) ini, jadi tidak lagi dalam tahap persiapan (*voorbereiding*) untuk melakukan tindak pidana. Ini perlu dikemukakan karena sebetulnya perbuatan pengambilan barang sebagai perbuatan pokok dari pencurian sama sekali belum mulai dijalankan.

7. Pasal 368 KUHP

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut :

- a. Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (*afpersing*).
Pemeras itu pekerjaannya:
- 1) memaksa orang lain;
 - 2) untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
 - 3) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. (pada Pasal 335, elemen ini bukan syarat).
- b. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 1) Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan;
 - 2) Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;
 - 3) Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369.
- c. Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370), tetapi apabila kekerasan itu demikian rupa sehingga menimbulkan “penganiayaan”, maka tentang penganiayaannya ini senantiasa dapat dituntut (tidak perlu ada pengaduan);
- d. Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

8. Pasal 480 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Elemen-elemen dalam Pasal 480 tentang penadahan adalah sebagai berikut:

- a. Sekongkol atau biasa disebut pula tadah dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
- b. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian yaitu:
 - 1) Membeli, menyewa dan lain sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung);
 - 2) Barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
 - 3) Menjual, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Selain daripada itu dihukum pula menurut pasal ini sub 2 adalah orang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.

- c. Elemen penting dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka

(mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu.

- d. Barang asal dari kejahatan misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain sebagainya. Asal dari pelanggaran tidak termasuk disini.

Barang yang diperoleh dengan kejahatan terdapat dua jenis :

Ke-1: Barang sebagai hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan;

Ke-2: Barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu atau surat palsu.

Perbedaan antara barang ke-1 dan ke-2 adalah barang ke-2 akan tetap merupakan barang yang diperoleh dengan kejahatan, sedangkan barang ke-1 ada kemungkinan berhenti dapat dinamakan barang yang diperoleh dengan kejahatan, yaitu apabila misalnya barang yang dicuri atau digeledah dengan pertolongan polisi sudah kembali ketangan si korban pencurian atau penggelapan.

- e. Kesengajaan atau *culpa*

Unsur kesengajaan atau culpa ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu di pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian atau penggelapan, atau pemerasan atau ancaman atau penipuan.

Hal ini merupakan unsur yang bersifat subjektif atau perorangan, yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan seseorang pelaku. Akan tetapi, ada unsur objektif yang tidak bergantung kepada jalan pikiran

atau jalan perasaan si pelaku, yaitu bahwa barang itu harus benar-benar merupakan hasil dari suatu kejahatan tertentu. Maka, harus terbukti ada terjadi, misalnya pencurian tertentu dan ada barang tertentu yang diperoleh dengan pencurian itu.

Dalam praktek, yang biasanya dapat dianggap terbukti adalah unsur *culpa* yaitu bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan. Jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal ini.

f. Hasil barang yang diperoleh dengan kejahatan

Unsur ini termuat dalam Pasal 480 ke-2 yang mengenai hal bahwa suatu barang, yang secara langsung diperoleh dengan pencurian atau penggelapan dan sebagainya sudah dijual atau sudah ditukarkan dengan lain barang, atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk membeli barang. Maka, barang siapa mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu, melakukan tindak pidana dari Pasal 480 ke-2 tersebut. Misalnya, seorang yang mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan barang yang dicuri atau digelapkan dan sebagainya.

g. Perbuatan si penadah, ada dua jenis yaitu:

Ke-1: Perbuatan bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah.

Ke-2: Perbuatan bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan.

Bagi perbuatan ke-2 ditambahkan unsur maksud untuk mendapatkan untung (*winsbejag*). Penambahan ini tidak diadakan pada perbuatan ke-1 karena maksud ini sudah tentu ada pada perbuatan ke-1. Jadi, dapat

dikatakan bahwa maksud untuk mendapat untung merupakan unsur dari semua penadah.

9. Pasal 492

- (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam Pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Supaya dapat dikenakan pasal ini harus dibuktikan bahwa:

- a. Orang itu mabuk, mabuk adalah berlainan dengan “kentara mabuk” dalam Pasal 536. Mabuk diartikan kebanyakan minum minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu panca inderanya atau anggota badannya. Kentara mabuk maksudnya lebih dari itu, yaitu mabuk sekali sehingga kelihatan dan menimbulkan gaduh pada sekitarnya.
- b. Ditempat umum tidak saja di jalan umum tetapi juga ditempat-tempat yang banyak dikunjungi orang banyak. Jika dirumah sendiri, tidak masuk disini.
- c. Merintangi lalu lintas mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Jadi, jika orang tersebut diam saja dirumahnya dan tidak mengganggu apa-apa, tidak dikenakan pasal ini.

10. Pasal 504 KUHP

- (1) ”Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.”

- (2) "Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan."

Elemen-elemen dari Pasal 504 tentang larangan mengemis adalah sebagai berikut:

- a. Larangan ini kelihatannya sedikit janggal dalam masyarakat Indonesia yang biasa berzakat memberi pada fakir miskin. Larangan ini seolah-olah *a social*, akan tetapi bukan itu yang dimaksud. Pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang meminta pertolongan, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum karena selain perbuatan itu dapat mengganggu orang-orang yang sedang bepergian, pun dilihat kurang pantas dan amat memalukan. Jika datang di rumah orang untuk memintanya, tidak dikenakan pasal ini;
- b. Minta-minta atau mengemis maksudnya dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik. Menjual lagu-lagu dengan jalan menyanyi (mengamen), menyodorkan permainannya sepanjang toko-toko dan rumah-rumah yang biasa dilakukan dikota-kota besar dapat masuk dalam pengertian mengemis.

11. Pasal 506 KUHP

"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun."

- a. Muchikari (*soutenur*) atau makelar cabul, artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langgan-an langgan-an, dari hasil mana ia mendapat bagiannya;

- b. Seorang laki-laki terhadap isterinya sendiri dapat pula dihukum sebagai muchikari, bila ia menarik isterinya untuk melakukan pelacuran, dengan hasil pelacuran tersebut si suami mendapat keuntungan uang;
- c. Apabila dibandingkan dengan Pasal 296 KUHP "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Pada Pasal 296 yang dapat dikenakan dengan pasal ini adalah orang yang menyediakan rumah atau kamar (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur. Sementara orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia, melakukan pelacuran di rumah itu, tidak dikenakan pasal ini karena orang tersebut tidak mempunyai maksud sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, niatnya hanya menyewakan rumah untuk tempat tinggal.

12. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Pasal 1

- (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
- (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam

pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

- (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosiemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Pasal 2

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Mengenai penjelasan terhadap Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dirasa sudah jelas dalam bunyi pasal

yang tercantum di atas sehingga terhadap pelanggaran tentang membawa senjata tajam di tempat umum tidak perlu diurakan kembali.

Berikut penulis juga akan menyajikan adalah data hasil "Operasi *Street Crime*" Kepolisian Kota Besar surakarta dalam bentuk tabel.

No	Bulan	Tersangka			Tindak Pidana		Keterangan
		Tangkap	Tahan	Bina	Pasal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nop 2008	302	15	277	170 303 362 363 480	5 3 3 3 1	Sidik = 15 Tipiring = 6
2	Des 2008	416	59	346	170 303 362 363 492 504 506	1 32 4 4 18 344 2	Sidik = 59 Tipiring = 13
3	Jan 2009	202	37	151	170 303 351	12 12 1	Sidik = 37 Tipiring = 14

					362 363 492 504	5 7 17 137	
4	Peb 2009	156	22	123	170 351 362 363	5 4 6 7	Sidik = 22 Tipiring = 11
5	Mar 2009	176	45	125	170 303 351 362 363	4 25 1 9 6	Sidik = 45 Tipiring = 6
6	April 2009	140	31	95	170 303 336 351 362 363	3 7 1 1 10 9	Sidik = 31 Tipiring = 14
7	Mei 2009	201	39	155	170 303 351 362 363 368	4 6 3 6 17 2	Sidik = 39 Tipiring = 7 UU Darurat No.12 Tahun 1951 = 1

Tabel Data Hasil Operasi Street Crime

B. Upaya Penanggulangan Premanisme yang Dilakukan oleh Poltabes Surakarta.

Terkait dengan tugas pokok POLRI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, dan sebagai pelayan, pelindung serta pengayom masyarakat, maka permasalahan mengenai premanisme yang sangat lekat dengan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian. Diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang sedari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam melaksanakan upaya

penanggulangan premanisme pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Poltabes Surakarta menempuh dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif.

1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Dalam penanggulangan premanisme secara preventif pihak Poltabes Surakarta telah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta dan instansi terkait.

Penyuluhan Hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum. Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsep penyuluhan hukum saat sekarang ini harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat, yang menjadi sasaran penyuluhan hukum, diharapkan tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga diharapkan mengerti hak-hak yang miliknya. Kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dibuat sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu mensejahterakan hidupnya. Karena itu mereka perlu mendapat penyuluhan hukum agar tahu bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan

yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut.

Eksistensi penyuluhan juga berkaitan dengan materi hukum yang disuluhkan. Banyak materi hukum yang disuluhkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Materi hukum yang disuluhkan selama ini kurang memberikan manfaat bagi penyelesaian masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat. Materi hukum yang disuluhkan seharusnya tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan tingkat pusat saja tetapi juga peraturan-peraturan di daerah. Peraturan perundang-undangan yang disuluhkan bukan hanya untuk kepentingan negara tetapi juga merupakan kebutuhan masyarakat setempat yang diperoleh dari hasil evaluasi dan peta permasalahan hukum di daerah-daerah.

Hal ini terkait dengan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan premanisme itu sendiri. Masyarakat dianggap mempunyai peran penting dalam pengungkapan terjadinya aksi premanisme yang terjadi di sekitar mereka. Kebanyakan aksi premanisme yang ditangani oleh Poltabes Surakarta dapat terungkap setelah ada laporan dari masyarakat. Perlu peran masyarakat bersama, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas mental masyarakat. Dengan mental individu-individu masyarakat yang baik diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan sehingga dapat menekan angka kriminalitas termasuk pula menekan terjadinya aksi premanisme di masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan premanisme, upaya preventif (pencegahan) dirasa mempunyai peran yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Beberapa alasan mengapa mencurahkan perhatian yang lebih besar pada upaya pencegahan sebelum praktik premanisme terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak dan tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban aksi premanisme, dan tindak kejahatan yang lain.
- b. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada pelaku premanisme yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan atau kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural (penimbulkan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tsb, misalnya korban suatu sistem hukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental fisik dan sosial).
- c. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan strabilitas dalam masyarakat, yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan

suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

2. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Untuk mengatasi masalah premanisme, selain tindakan preventif, dapat pula diadakan tindakan represif antara lain dengan teknik rehabilitasi. Ada dua konsepsi mengenai teknik rehabilitasi tersebut. Pertama, menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang yang berperilaku preman. Sistem dan program tersebut bersifat reformatif, misalnya hukuman bersyarat, hukuman kurungan serta hukuman penjara. Teknik kedua lebih menekankan pada usaha agar dapat berubah menjadi orang biasa. Dalam hal ini pembinaan psikologis dan penyadaran disertai latihan-latihan keterampilan kerja dalam masa hukuman agar punya modal untuk mencari pekerjaan.

Selain menjalankan upaya penanggulangan premanisme secara preventif, pihak Poltabes Surakarta juga menempuh melalui upaya represif. Upaya represif yang dilakukan mempunyai maksud untuk menanggulangi premanisme yang sudah terjadi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku premanisme. Dalam upaya secara represif pihak Poltabes Surakarta melaksanakan operasi khusus dengan sandi “Operasi *Street Crime*” yang pelaksanaannya telah diatur secara terstruktur oleh POLRI. Poltabes Surakarta melakukan penindakan upaya hukum terhadap aksi-aksi premanisme, baik premanisme individu, premanisme kelompok maupun terhadap premanisme aparat. Penindakan hukum yang dimaksud adalah dengan melakukan razia secara terstruktur dan penangkapan terhadap pelaku premanisme yang terjaring dalam razia.

Razia dilakukan menyusul seruan dari Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji tentang pemberantasan premanisme. Operasi tersebut dilakukan sejak 2 November

2008 hingga situasi kondusif dan sampai sekarang operasi masih tetap dijalankan.

Razia serupa juga secara serentak dilakukan di beberapa daerah. Razia premanisme yang digelar jajaran polisi dilakukan untuk mengurangi dan menekan tindak kriminal, dan juga membuat rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Razia terhadap preman-preman dilakukan disetiap titik dimana menurut laporan masyarakat di daerah tersebut banyak dijumpai preman-preman yang meresahkan masyarakat. Tempat-tempat tersebut antara lain di terminal-terminal, pasar-pasar, dan tempat umum lainnya. Pihak Poltabes Surakarta beserta jajarannya menangkap semua preman yang berada ditempat-tempat tersebut dan membawanya untuk kemudian diperiksa apakah mereka terkait tindak kejahatan atau tidak, jika mereka terkait maka mereka akan ditahan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut dan jika tidak mereka akan dibawa ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan binaan.

Dengan operasi seperti ini mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari operasi ini dan juga membuat masyarakat atau warga menjadi aman dan nyaman, karena selama ini banyak masyarakat atau warga yang tidak merasa aman dan nyaman dengan banyak terjadinya pemalakan atau perampasan, penodongan, pencopetan, dan lain-lain yang terjadi ditempat-tempat umum seperti di jalan umum, di angkutan-angkutan umum, di terminal, di pasar dan lain-lain.

Tentu ini bukan hanya tugas aparat penegak hukum semata. Semua individu punya kewajiban mencegah timbulnya premanisme, lantaran begitu luasnya spektrum premanisme. Tangan polisi tidak mampu menjangkau semuanya tanpa partisipasi masyarakat. Secara nyata premanisme tak kalah berbahaya dengan preman karena premanisme menunjuk pada sikap, ideologi, tindakan yang dilakukan seseorang layaknya perilaku preman.

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan premanisme oleh Poltabes Surakarta tentu tidak terlepas dari adanya berbagai kendala, kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1) Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi premanisme takut skeptis masyarakat terhadap preman, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau yang diketahuinya.
- 2) Sulitnya melacak premanisme aparat disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi premanisme yang di-*backing* oleh oknum-oknum tertentu yang notabene juga berprofesi sebagai aparat. Informasi mengenai jaringan premanisme aparat sering kali terputus pada kalangan bawahan saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut.

BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam penelitian ini ada dua masalah pokok yang dikaji oleh penulis, pertama adalah tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme dan kedua adalah upaya penanggulangan premanisme yang dilakukan oleh Poltabes Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme

Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh premanime yang terjaring dalam “Operasi *Street Crime*” oleh Poltabes Surakarta antara lain adalah:

- 1) Pasal 170 KUHP tentang melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum;
- 2) Pasal 303 KUHP tentang perjudian di muka umum;
- 3) Pasal 336 KUHP tentang ancaman dengan kekerasan;
- 4) Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan;
- 5) Pasal 362 KUHP tentang pencurian;
- 6) Pasal 363 KUHP tentang pencurian khusus (*gequalificeerde diefstal*);
- 7) Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan (*afpersing*);
- 8) Pasal 480 KUHP tentang penadahan (*heling*);
- 9) Pasal 492 KUHP tentang mabuk-mabukan di muka umum;
- 10) Pasal 504 KUHP tentang mengemis di muka umum;

- 11) Pasal 506 KUHP tentang praktik pelacuran atau prostitusi;
 - 12) Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang membawa senjata di muka umum.
2. Upaya Penanggulangan Premanisme oleh Poltabes Surakarta

Dalam upaya penanggulangan premanisme di Surakarta, pihak Poltabes Surakarta menempuh dengan upaya secara preventif dan dengan secara represif. Cara preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut. Sehingga masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan premanisme. Selain dengan upaya preventif, pihak Poltabes Surakarta juga menempuh upaya represif untuk menindak aksi-aksi premanisme yang terjadi di masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan melaksanakan "Operasi *Street Crime*" dengan cara merazia dan menindak para pelaku premanisme di masyarakat.

B. Saran

1. Penanggulangan terhadap tindak pidana oleh premanisme juga dapat dimulai dari tindakan kita sehari-hari. Tanpa disadari, kita mungkin sering melakukan tindakan premanisme kecil-kecilan. Seperti misalnya parkir di trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki, tidak membayar hutang yang seharusnya menjadi hak yang memberi hutang, sebagai senior memeras mahasiswa baru, dan sebagainya. Jika hal-hal premanisme sumir seperti itu bisa kita hilangkan, tentunya akan berdampak besar, sehingga orang lain pun tidak akan melakukan aksi premanisme terhadap kita. Jika semua orang seperti itu, tentunya tidak ada lagi premanisme besar-besaran, apalagi premanisme antar negara.

2. Dalam mengatasi premanisme dan menanggulangi premanisme dapat dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Perlu dilihat akar permasalahan mendasar yang mengakibatkan maraknya premanisme yaitu kemiskinan. Sehingga untuk menanggulangi premanisme adalah dengan memperbaiki perekonomian dan membuat rakyat sejahtera. Kesejahteraan inilah yang harusnya menjadi titik perhatian pemerintah. Kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi rakyat.
 - b. Ada tiga metode pendekatan yang bisa diterapkan untuk menanggulangi masalah premanisme di masyarakat yaitu melalui pendekatan keagamaan, kemanusiaan, dan ekonomi: :
 - 1) Pendekatan keagamaan dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang apa arti dan tujuan hidup dalam doktrin agama yaitu menuju kehidupan yang aman, damai, dan beriman.
 - 2) Pendekatan kemanusiaan, para pelaku premanisme harus diperlakukan penuh kasih sayang dalam artian mereka tidak diperlakukan secara kasar dan tidak bernilai.
 - 3) Pendekatan ekonomi, mereka harus diberdayakan untuk kemudian memiliki sumber pencarian yang dapat menghidupi keluarga mereka.
3. Upaya penanggulangan premanisme adalah tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Sehingga dituntut peran aktif dari masyarakat untuk membantu pelaksanaan penanggulangan premanisme yang telah ditempuh oleh pihak kepolisian, agar dapat tercipta ketertiban bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- _____. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Utama.
- HB Sutopo. 1992. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pusat Penelitian Surakarta.
- Lexi J Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rodakarya.
- Lilik Mulyadi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Martiman Prodjomidjojo. 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- R.Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- R.Subekti Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita
- Tjejep Rohendi Rohidi. 1992. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2002. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Simons. 1992. *Leerboek van Het Nederlandsche Strafrecht*, (terjemahan). Bandung: Pioner Jaya.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- _____. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- _____. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Aswar Hasan. *Polisi Menumpas Premanisme, Mungkinkah?*. < http://www.kendariekspres.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=122 .> [30 Januari 2009] pukul 18.21
- Eep Saefulloh. *Arsip Refleksi (15) Tentang Premanisme*. <<http://eep.saefulloh.fatah.tripod.com/id82.htm>> [29 April 2009] pukul 17.21
- Elwin Tobing. *Premanisme dan Tantangan Sosio-politik dan Budaya*. <<http://www.theindonesianinstitute.org/tpmar1203.htm>> [30 April 2009] pukul 07.23
- Indah Puspita Sari. *Penanggulangan Masalah Preman Ditinjau Dari Sudut Politik Kriminal*. <<http://www.blogger.com/emailpost.g?blogID=2782889200159994577&postID=2045864001554236146>> [29 April 2009] pukul 17.09

Kardoman Tumangger. *Langkah pemberantasan preman, tepatkah?*.

<<http://kardomantumangger.blogspot.com/2008/11/langkah-pemberantasan-preman-tepatkah.html>> [29 April 2009] pukul 18.11

Kriminologi. <<http://bengkuluutara.wordpress.com/2008/06/01/kriminologi/>> [3 Agustus 2009] pukul 16.55

Premanisme. <<http://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme.>> [4 Mei 2009] pukul 18.59